

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan salah satu Kota Pariwisata yang terkenal di Pulau Jawa yang didirikan pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I yang bersamaan dengan dibangunnya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pemerintahan di Kota Yogyakarta baru terbentuk pada tanggal 7 Juni 1947, yakni dimana saat berdirinya disebut sebagai Kota Praja.

Berbeda dengan kota lainnya, Kota Yogyakarta dijamin penjajahan Belanda belum pernah menjadi kota otonom. Hal ini menjadikan Kota Yogyakarta belum pernah memiliki pemerintahan tersendiri. Kota Praja Yogyakarta yang lahir dengan ditetapkannya Undang-Undang No.17 Tahun 1947 yang membentuk Kota Yogyakarta sebagai haminte Kota atau Kota Otonom. Undang-Undang tersebut merupakan produk perundang-undangan di jaman kemerdekaan tertanggal 7 Juni 1947. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai Kota Perjuangan itu, bukan dilahirkan oleh penjajahan, melainkan dilahirkan pada masa kemerdekaan, bahkan lahir pada saat perjuangan nasional, ketika bangsa Indonesia sedang menegakkan kedaulatan negara setelah Proklamasin17 Agustus 1945.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX maupun Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta dari Presiden Republik Indonesia, maka pada tanggal 5 September 1945, beliau mengeluarkan amanatnya yang pertama yang menyatakan, bahwa daerah Kasultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa dan menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945 dan atas keadaan Daerah Istimewa Yogyakarta beliau bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 1945 beliau mengeluarkan amanatnya yang kedua yang menyatakan, bahwa pelaksanaan Pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia.

Kota Yogyakarta, baik yang menjadi bagian dari Kasultanan maupun menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat dibentuk satu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh Kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, akan tetapi kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab masih tetap di Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

Otonomi baru diserahkan dengan lahirnya Undang-Undang No. 17 tahun 1947 dimana pasal 1 menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah itu dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Secara yuridis formal Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 1947 telah sah menjadi Kota Otonom yang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Pemerintahan sudah ada seperti : DPRD, Walikota, wewenangnya sudah jelas dan APBD pertamanya juga telah dilampirkan pada undang-undang pembentukan tersebut, hanya penyerahan wewenang dari Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kota Praja Yogyakarta yang menjadi haknya menurut Undang-undang belum dilaksanakan.

Jika kita melihat keluarnya Undang-Undang Pembentukan Haminte Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 1947, maka kota Yogyakarta dibentuk sebagai Kota Praja sebelum Clash I, akan tetapi jika kita melihat penyerahan wewenang itu secara riil dari Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kota Praja Yogyakarta baru terjadi dalam tahun 1951, maka untuk melaksanakan penyerahan wewenang otonomi tersebut disebabkan terjadinya Clash I dan Clash II setelah keluarnya Undang-Undang No.17 Tahun 1947, selain itu juga disebabkan oleh berbagai hal diantaranya;

1. Membentuk Kota Yogyakarta sebagai Kota Otonomi harus melalui Undang-Undang
2. Dengan terbentuknya Kota Yogyakarta, maka akan merupakan bagian yang terpisah dari daerah Kasultanan dan Pakualaman serta memiliki otonomi sendiri.

Nampaknya dalam pembentukan haminte Kota Yogyakarta kurang memperhatikan hal tersebut. Sebab pada tanggal 7 Juni 1947 itu status Daerah Istimewa Yogyakarta belum diatur dengan Undang-Undang oleh pemerintah pusat sesuai dengan pasal 18 UUD 1945, padahal kota Yogyakarta terlebih dahulu dibentuk oleh Pemerintah Pusat sebagai Haminte Kota dengan Undang-

Undang. Ini akan berakibat bahwa pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta akan kehilangan kekuasaan dan pengawasan terhadap pemerintah Haminte Kota Yogyakarta. Sehubungan dengan hal itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum bersedia menyerahkan sebagian wewenangnya, sebelum status Daerah Istimewa Yogyakarta ditentukan, maka Haminte Kota Yogyakarta tetap menjadi bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan tetap mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya Pemerintahan Haminte Kota Yogyakarta.

Masalah itu bisa diatasi setelah dikeluarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1948 yang mengatur tentang pokok-pokok Pemerintah daerah di seluruh wilayah dan berdasarkan Undang-Undang pokok pemerintahan daerah tersebut dikeluarkan Undang-Undang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta No.3 Tanggal 15 Agustus 1950 dan bersamaan dengan itu dikeluarkan undang-undang nomor 16 Tahun 1950 yang merubah Undnag-Undang No.17 tahun 1947, dengan demikian Daerah Istimewa Yogyakarta Maupun Kota Pradja Yogyakarta sama-sama ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang Pokok pemerintah Daerah No. 22 tahun 1948, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Tingkat I dan Kota Praja Yogyakarta sebagai Daerah Tingkat II sekaligus menjadi Istimewa bagian dari Daerah Yogyakarta (Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2013).

B. Kondisi Geografis Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta adalah salah satu dari lima daerah tingkat II yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah ini memiliki posisi yang sangat strategis

karena berada di tengah – tengah kota Yogyakarta dan merupakan Ibukota Propinsi. Secara garis besar Yogyakarta adalah daerah daratan rendah yang dilintasi oleh tiga buah sungai yaitu :

1. Disebelah barat : Sungai Winongo
2. Disebelah timur : Sungai Gajah Wong
3. Di tengah : Sungai Code

Kota Yogyakarta terletak pada ketinggian 114,00 meter dari permukaan laut, dengan suhu rata – rata 26,1°C .

1. Batas Wilayah

Kota Yogyakarta adalah daerah tingkat II yang memiliki letak sangat strategis yaitu berada di tengah – tengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang secara administrasi diapit dua daerah tingkat II lainnya, yaitu daerah tingkat II Kabupaten Bantul dan Daerah tingkat II Kabupaten Sleman.

Adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Sleman.
- c) Sebelah Selatan : Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Sleman.

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah kota Yogyakarta sekitar 32,5 km² yang terbagi menjadi 14 wilayah kecamatan dan 45 kelurahan yang dibentuk berdasarkan

keputusan mendagri nomor : 140 – 263 tentang pembentukan kelurahan-kelurahan di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 4.1 Pembagian wilayah Menurut Kecamatan dan Luas (Km²)

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1.	Mantrijeron	2, 61
2.	Kraton	1, 40
3.	Margangsan	2, 31
4.	Umbulharjo	8, 12
5.	Kota Gede	3, 07
6.	Gondokusuman	3, 97
7.	Danurejan	1, 10
8.	Pakualaman	0, 63
9.	Gondomanan	1, 12
10.	Ngampilan	0, 82
11.	Wirobrajan	1, 76
12.	Gedongtengen	0, 96
13.	Jetis	1, 72
14.	Tegalrejo	2, 91
		32, 50

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2013

C. Kondisi Demografis Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta sebagai daerah yang paling strategis dari empat wilayah daerah lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta serta memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Berdasarkan data tahun 2012 akhir, penduduk kota

Yogyakarta terdapat 394.627 jiwa dengan perincian laki – laki berjumlah 191.445 jiwa dan perempuan berjumlah 202.567 jiwa.

Kalau kita lihat jumlah penduduk di atas, bila dibandingkan dengan luas kota Yogyakarta yang hanya mencapai 32,5 km², maka kepadatan penduduknya mencapai 12,123 jiwa setiap km², berikut ini disajikan tabel kepadatan penduduk menurut jenis kelamin.

Tabel 4.2 Kepadatan Kota Yogyakarta tiap – tiap km

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	2008	2009	2010	2011	2012
1	Mantrijeron	2, 61	14,346	14,534	11,980	12,039	12,144
2	Kraton	1, 40	16,086	16,281	12,479	12,541	12,544
3	Margangsan	2, 31	15,550	15,706	12,681	12,743	12,748
4	Umbulharjo	8, 12	9,768	9,891	9,451	9,498	9,708
5	Kota Gede	3, 07	10,522	10,693	10,147	10,198	10,440
6	Gondokusuman	3. 97	13,962	14,126	11,352	11,465	11,468
7	Danurejan	1. 10	20,620	20,881	16,675	16,757	16,757
8	Pakualaman	0. 63	18,679	18,346	14,787	14,860	14,867
9	Gondomanan	1. 12	14,279	14,454	11,633	11,690	11,694
10	Ngampilan	0. 82	24,673	24,920	19,902	20,001	20,002
11	Wirobrajan	1. 76	17,673	17,998	14,114	14,183	14,187
12	Gedongtengen	0. 96	21,273	21,525	17,901	17,990	17,993
13	Jetis	1. 72	17,918	18,231	13,796	13,703	13,703
14	Tegalrejo	2. 91	14,102	14,239	12,001	12,060	12,299
		32. 50	14,059	14,239	11,958	12,017	12,123

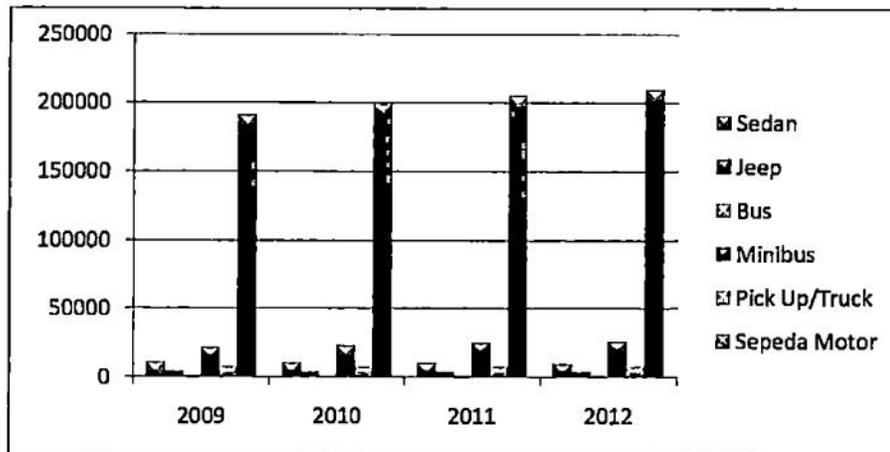
Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2009-2013

Pada umumnya penduduk di wilayah kota Yogyakarta adalah suku bangsa jawa, karena itu budaya jawa sangat menonjol keberadaannya. Jumlah penduduk 493, 903 jiwa di pertengahan tahun 2000, tetapi jumlah yang demikian pada siang harinya bertambah dua kali lipat karena penduduk dari kabupaten sekitar, datang untuk bekerja dan belajar di kota Yogyakarta.

Jumlah angkatan kerja berkembang sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk. Angkatan kerja di definisikan sebagai penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja atau sedang mencari kerja. Jumlah tenaga kerja di kota Yogyakarta sebesar 51, 73 % yang merupakan angkatan kerja, dan sisanya 48, 27 % bukan angkatan kerja yaitu termasuk mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

D. Keadaan Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta

Gambar 4.1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta



Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2012-2013

Berdasarkan adanya penambahan kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta, menjadikan salah satu faktor penambahan pengguna sepeda motor di Kota Yogyakarta. Peningkatan terjadi pada setiap tahunnya yakni di tahun 2009 hingga tahun 2012, dimana di tahun 2012 jumlah pengguna sepeda motor mencapai 209.579. Kota Yogyakarta merupakan salah satu Kota Pariwisata yang ada di Pulau Jawa. Selain menjadi Kota Pariwisata, Kota Yogyakarta juga terkenal sebagai Kota Pelajar, dimana banyak pelajar datang ke Kota Yogyakarta.

E. Daerah Kawasan Wisata “Malioboro”

Kawasan malioboro merupakan tempat yang terkenal dengan bagian kota yang tak pernah tidur. Karena malioboro selalu dikunjungi wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Hal ini dikarenakan malioboro memiliki kekhasan tersendiri terutama keberadaan pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangan khas kerajinan Yogyakarta.

Malioboro juga merupakan salah satu jalan protokol yang tepat berada di jantung kota Yogyakarta. Kawasan malioboro terbentang sepanjang 3 kilometer dari pagelaran alun – alun utara sampai dengan bangunan tugu di pusat kota Yogyakarta. Sepanjang jalan ini terbagi menjadi empat ruas jalan dengan nama yang berbeda. Diujung selatan bernama jalan trikora, dari perempatan kantor pos sampai dengan perempatan kepatihan Danurejan bernama A. Yani, adapun yang disebut malioboro adalah jalan yang terbentang antara jalan A. Yani sampai batas pintu lalu lintas kereta api stasiun tugu, kemudian sebelah utara di beri

nama jalan P. Mangkubumi. Sebagai jalan protokol, kawasan malioboro merupakan pusat pengembangan kota Yogyakarta. Selain itu juga pusat kegiatan kota yang telah mewadai kegiatan perdagangan, budaya, pariwisata dan pemerintahan. Dalam pengembangannya sebagai pusat kegiatan, malioboro sudah tidak dapat menampung segala kegiatan yang ada.